

INDIKATOR KINERJA UTAMA

- NAMA PD : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ROTE NDAO
- VISI : Terwujudnya masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT secara berkelanjutan bertumpu pada pariwisata yang didukung oleh pertanian dan perikanan
- MISI : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur, penataan ruang dan lingkungan hidup yang berkelanjutan
- TUGAS POKOK : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup”.
- FUNGSI :
 1. Perumusan kebijakan bidang perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
 2. Pelaksanaan kebijakan bidang perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
 4. Pelaksanaan administrasi dinas bidang perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan amanat Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- ISU STRATEGIS : Meningkatkan akses masyarakat akan infrastruktur dasar dan mencegah penurunan kualitas lingkungan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFENISI OPERASIONAL	FORMULA PENGUKURAN	UNIT TERKAIT	SUMBER DATA	SUMBER DANA								
1	2	3	4	5	6	7	8	9								
1.	Meningkatnya pelayanan administrasi kantor	Pelayanan administrasi perkantoran		Meningkatkan kinerja operasional kantor DPKPLH		Dinas Perumahan Kawasana Permukiman dan Lingkungan Hidup	Bidang Sekretariat	APBN/APBD								
2.	Terjaganya kualitas lingkungan sesuai standar baku mutu lingkungan	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	Indeks	Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	$\text{nilai relatif} = \frac{Ci}{LIj}$ <p>Rumus Metode IP :</p> $IP = \sqrt{\left(\frac{Ci}{LIj}\right)^2 \text{rata - rata} + \left(\frac{Ci}{LIj}\right)^2 \text{Maksimum}}$ <p style="text-align: center;">2</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">$0 \leq PIj \leq 1,0$</td> <td style="width: 40%;">\rightarrow baik (memenuhi baku mutu)</td> </tr> <tr> <td>$1,0 \leq PIj \leq 5,0$</td> <td>\rightarrow cemar ringan</td> </tr> <tr> <td>$5,0 \leq PIj \leq 10,0$</td> <td>\rightarrow cemar sedang</td> </tr> <tr> <td>$> 10,0$</td> <td>\rightarrow cemar berat</td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">PIj</p>	$0 \leq PIj \leq 1,0$	\rightarrow baik (memenuhi baku mutu)	$1,0 \leq PIj \leq 5,0$	\rightarrow cemar ringan	$5,0 \leq PIj \leq 10,0$	\rightarrow cemar sedang	$> 10,0$	\rightarrow cemar berat	Dinas Perumahan Kawasana Permukiman dan Lingkungan Hidup	Bidang Analisis dan Informasi Lingkungan	APBN/APBD
$0 \leq PIj \leq 1,0$	\rightarrow baik (memenuhi baku mutu)															
$1,0 \leq PIj \leq 5,0$	\rightarrow cemar ringan															
$5,0 \leq PIj \leq 10,0$	\rightarrow cemar sedang															
$> 10,0$	\rightarrow cemar berat															
3.	Terjaganya kualitas lingkungan sesuai standar baku mutu lingkungan	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	Indeks	Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	$IKU = 100 - \{50 / 0.9 \times (Leu - 0.1)\}$	Dinas Perumahan Kawasana Permukiman dan Lingkungan Hidup	Bidang Analisis dan Informasi Lingkungan	APBN/APBD								

4.	Terjaganya kualitas lingkungan sesuai standar baku mutu lingkungan	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	Indeks	Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	$IKTL = 100 - \{84,3 - (TH \times 100)\} \times \frac{50}{54,3}$ dimana: IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TH = Tutupan Hutan 5	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Bidang Analisis dan Informasi Lingkungan	APBN/APBD
5.	Berkurangnya tingkat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	Persen (%)	Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Jumlah lokasi pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor X 100% Jumlah seluruh wilayah rawan longsor	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Bidang Analisis dan Informasi Lingkungan	APBN/APBD
6.	Berkurangnya tingkat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	persentase pembangunan bangunan penahan abrasi pantai	Persen (%)	Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Bidang Analisis dan Informasi Lingkungan	APBN/APBD
7.	mengembangkan sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Database lingkungan hidup	Doc	Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	ada / tidak ada	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Bidang Analisis dan Informasi Lingkungan	APBN/APBD
8.	meningkatnya kebersihan kota	Timbulan sampah yang ditangani	Persen (%)	Meningkatkan Pengelolaan Persampahan	Volume timbulan sampah yang ditangani X 100% Total timbulan sampah	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Bidang Pengawasan Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan	APBN/APBD
9.	meningkatnya kebersihan daerah	Timbulan sampah yang dikurangi	Persen (%)	Meningkatkan Pengelolaan Persampahan	Volume timbulan sampah yang dikurangi X 100% Total timbulan sampah	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Bidang Pengawasan Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan	APBN/APBD
10.	Meningkatnya kebersihan daerah	Persentase jumlah sampah yang tertangani (%)	Persen (%)	Meningkatkan Pengelolaan Persampahan	Jumlah sampah yang tertangani (ton) X 100% total jumlah sampah yang timbul (ton)	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Bidang Pengawasan Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan	APBN/APBD
11.	Meningkatnya kebersihan daerah	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten	jumlah	Meningkatkan Pengelolaan Persampahan	Nilai TPA (Program Adipura) ≥ 71	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Bidang Pengawasan Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan	APBN/APBD
12.	Meningkatnya kebersihan daerah	persentase pengelolaan sampah oleh swasta terhadap peraturan perundang-undangan	Persen (%)	Meningkatkan Pengelolaan Persampahan	Jumlah pengelolaan sampah oleh swasta yang taat pada peraturan X 100% jumlah pengelolaan sampah oleh swasta	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Bidang Pengawasan Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan	APBN/APBD
13.	Meningkatkan sinergitas perencanaan program-program pembangunan tingkat kabupaten, OPD dan Swasta	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten		menintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam dokumen pembangunan daerah	Jumlah ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi yang ditangani X 100% total penanggung jawab usaha dan atau lingkungan yang dibina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Bidang Analisis dan Informasi Lingkungan	APBN/APBD

14.	Meningkatkan sinergitas perencanaan program-program pembangunan tingkat kabupaten, OPD dan Swasta	Jumlah PPLHD yang dilatih dan/di bina		menintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam dokumen pembangunan daerah		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Bidang Analisis dan Informasi Lingkungan	APBN/APBD
15.	Meningkatkan sinergitas perencanaan program-program pembangunan tingkat kabupaten, OPD dan Swasta	Tersusunnya dokumen RPPLH Kabupaten		menintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam dokumen pembangunan daerah	ada / tidak ada	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Bidang Analisis dan Informasi Lingkungan	APBN/APBD
16.	Meningkatkan sinergitas perencanaan program-program pembangunan tingkat kabupaten, OPD dan Swasta	terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten		menintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam dokumen pembangunan daerah	ada / tidak ada	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Bidang Analisis dan Informasi Lingkungan	APBN/APBD
17.	Meningkatkan sinergitas perencanaan program-program pembangunan tingkat kabupaten, OPD dan Swasta	terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten		menintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam dokumen pembangunan daerah	ada / tidak ada	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Bidang Analisis dan Informasi Lingkungan	APBN/APBD
18.	Meningkatnya peran serta masyarakat dan ketaatan terhadap hukum	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	jumlah	Meningkatkan peran serta masyarakat dan ketaatan terhadap hukum lingkungan	Jumlah MHA yang diakui	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Bidang Analisis dan Informasi Lingkungan	APBN/APBD
19.	Meningkatnya peran serta masyarakat dan ketaatan terhadap hukum	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	jumlah	Meningkatkan peran serta masyarakat dan ketaatan terhadap hukum lingkungan	Jumlah MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional yang diverifikasi	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Bidang Analisis dan Informasi Lingkungan	APBN/APBD
20.	Meningkatnya peran serta masyarakat dan ketaatan terhadap hukum	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	jumlah	Meningkatkan peran serta masyarakat dan ketaatan terhadap hukum lingkungan	Jumlah hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional yang diverifikasi	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Bidang Analisis dan Informasi Lingkungan	APBN/APBD
21.	Meningkatnya peran serta masyarakat dan ketaatan terhadap hukum	Penetapan hak MHA	jumlah	Meningkatkan peran serta masyarakat dan ketaatan terhadap hukum lingkungan	jumlah penetapan hak MHA	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Bidang Analisis dan Informasi Lingkungan	APBN/APBD
22.	Meningkatnya peran serta masyarakat dan ketaatan terhadap hukum	terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup jumlah sekolah yang menerapkan adiwiyata		Meningkatkan peran serta masyarakat dan ketaatan terhadap hukum lingkungan	ada / tidak ada	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Bidang Pengawasan Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan	APBN/APBD
23.	Meningkatnya peran serta masyarakat dan ketaatan terhadap hukum	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	jumlah	Meningkatkan peran serta masyarakat dan ketaatan terhadap hukum lingkungan	Jumlah MHA yang difasilitasi X 100% jumlah total MHA	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Bidang Pengawasan Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan	APBN/APBD
24.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar perumahan	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persen (%)	meningkatkan akses sarana dan prasarana sanitasi terhadap rumah tinggal masyarakat	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi X 100% Jumlah rumah tinggal	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Bidang Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	APBN/APBD
25.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar perumahan	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	M3	menciptakan lingkungan perumahan dan permukiman layak huni dengan prasarana dan sarana umum dalam kondisi baik	volume sampah diperkotaan yang mengalami guna ulang, daur ulang pengelolaan di tempat pengelolaan sampah sebelum masuk TPAX 100% Total volume sampah	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Bidang Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	APBN/APBD

26.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar perumahan	Rasio Rumah Layak Huni (%)	Persen (%)	menciptakan lingkungan perumahan dan permukiman layak huni dengan prasarana dan sarana umum dalam kondisi baik	Jumlah rumah layak huniX 100% Jumlah penduduk	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Bidang Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	APBN/APBD
27.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar perumahan	Rasio Permukiman layak huni	Persen (%)	menciptakan lingkungan perumahan dan permukiman layak huni dengan prasarana dan sarana umum dalam kondisi baik	Luas pemukiman layak huniX 100% luas wilayah pemukiman	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Bidang Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	APBN/APBD
28.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar perumahan	Cakupan Ketersediaan rumah layak huni	Persen (%)	menciptakan lingkungan perumahan dan permukiman layak huni dengan prasarana dan sarana umum dalam kondisi baik	Jumlah seluruh rumah layak disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu X 100% jumlah rumah disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Bidang Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	APBN/APBD
29.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar perumahan	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang terjangkau	Persen (%)	menciptakan lingkungan perumahan dan permukiman layak huni dengan prasarana dan sarana umum dalam kondisi baik	Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu X 100% Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Bidang Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	APBN/APBD
30.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar perumahan	Persentase Pemukiman yang tertata	Persen (%)	menciptakan lingkungan perumahan dan permukiman layak huni dengan prasarana dan sarana umum dalam kondisi baik	Luas area permukiman tertata X 100% Luas area permukiman keseluruhan	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Bidang Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	APBN/APBD
31.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar perumahan	Lingkungan permukiman kumuh	unit	menciptakan lingkungan perumahan dan permukiman layak huni dengan prasarana dan sarana umum dalam kondisi baik	Luas lingkungan permukiman kumuh X 100% Luas wilayah	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Bidang Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	APBN/APBD
32.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar perumahan	Luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	m3	menciptakan lingkungan perumahan dan permukiman layak huni dengan prasarana dan sarana umum dalam kondisi baik	Luasan permukiman kumuh yang tertangani X 100% Luas permukiman kumuh	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Bidang Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	APBN/APBD
33.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar perumahan	Persentase areal kawasan kumuh	Persen (%)	menciptakan lingkungan perumahan dan permukiman layak huni dengan prasarana dan sarana umum dalam kondisi baik	Luas Kawasan Kumuh X 100% Luas Wilayah	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Bidang Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	APBN/APBD

34.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar perumahan	Rumah tangga kumuh perkotaan	unit	menciptakan lingkungan perumahan dan permukiman layak huni dengan prasarana dan sarana umum dalam kondisi baik	Jumlah rumah tangga kumuh perkotaan X 100% Jumlah seluruh rumah	Dinas Perumahan Kawasana Permukiman dan Lingkungan Hidup	Bidang Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	APBN/APBD
35.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar perumahan	Persentase penduduk berakses air minum	Persen (%)	meningkatkan akses sarana dan prasarana air minum terhadap masyarakat	Penduduk berakses air minum X 100% Jumlah penduduk	Dinas Perumahan Kawasana Permukiman dan Lingkungan Hidup	Bidang Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	APBN/APBD
36.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar perumahan	Poroporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	Unit	meningkatkan akses sarana dan prasarana air minum layak terhadap masyarakat perkotaan dan perdesaan	Jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan X 100% Jumlah penduduk seluruhnya	Dinas Perumahan Kawasana Permukiman dan Lingkungan Hidup	Bidang Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	APBN/APBD
37.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar perumahan	Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU		Terciptanya lingkungan perumahan dan permukiman yang layak huni dengan prasarana dan sarana umum dalam kondisi baik	Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu X 100% Jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu	Dinas Perumahan Kawasana Permukiman dan Lingkungan Hidup	Bidang Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	APBN/APBD
38.	meningkatnya ketersediaan tanah untuk kegiatan pembangunan, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat	persentase luas lahan bersertifikat		Tersedianya tanah untuk memenuhi program strategis daerah	Jumlah Luas Lahan bersertifikat X 100% Jumlah luas wilayah	Dinas Perumahan Kawasana Permukiman dan Lingkungan Hidup	Bidang Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	APBN/APBD
39.	meningkatnya ketersediaan tanah untuk kegiatan pembangunan, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat	Penyelesaian kasus tanah negara		Tersedianya tanah untuk memenuhi program strategis daerah	Jumlah kasus yang diselesaikan X 100% Jumlah kasus yang terdaftar	Dinas Perumahan Kawasana Permukiman dan Lingkungan Hidup	Bidang Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	APBN/APBD
40.	Berkurangnya pencemaran dan kerusakan SDA dan LH	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	Persen (%)	Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Panjang Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (Km) X 100% Panjang seluruh sempadan sungai kabupaten (Km)	Dinas Perumahan Kawasana Permukiman dan Lingkungan Hidup	Bidang Pengawasan Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan	APBN/APBD
41.	Terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persen (%)	Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (Km) X 100% Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten (Km)	Dinas Perumahan Kawasana Permukiman dan Lingkungan Hidup	Bidang Pengawasan Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan	APBN/APBD
42.	Terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	Persen (%)	Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Luasan daerah yang tergenang X 100% Luasan daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang	Dinas Perumahan Kawasana Permukiman dan Lingkungan Hidup	Bidang Pengawasan Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan	APBN/APBD
43.	Berkurangnya tingkat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	Persen (%)	Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Jumlah lokasi pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor X 100% Jumlah seluruh wilayah rawan longsor	Dinas Perumahan Kawasana Permukiman dan Lingkungan Hidup	Bidang Pengawasan Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan	APBN/APBD

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NAMA PD	:	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ROTE NDAO
VISI	:	Terwujudnya masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT secara berkelanjutan bertumpu pada pariwisata yang didukung oleh pertanian dan perikanan
MISI	:	1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan berdaya saing
		2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata yang di dukung oleh pertanian dan perikanan
		3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur, penataan ruang dan lingkungan hidup yang berkelanjutan
		4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta meningkatkan pelayanan publik yang prima
TUGAS POKOK	:	Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup".
FUNGSI	:	1. Perumusan kebijakan bidang perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
		2. Pelaksanaan kebijakan bidang perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
		3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
		4. Pelaksanaan administrasi dinas bidang perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
		5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan amanat Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan tugas dan fungsinya.
ISU STRATEGIS	:	1. Belum memadainya penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman dan masih banyak rumah yang tidak layak huni dan rendahnya sanitasi.
		2. Belum optimalnya pengelolaan tanah pemerintah dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam perizinan dan persertifikatkan tanah
		3. Masih rendahnya infrastruktur perdesaan yang memadai untuk mendukung berbagai aktifitas masyarakat Desa
		4. Masih rendahnya bangunan masyarakat dan pemerintah yang ber _IMB
		5. Belum tersedianya Rencana Tata Bangunan dan Lahan sebagai arahan pengembangan bangunan di kab. Rote Ndao yang disiapkan melalui regulasi
		6. Meningkatnya aktivitas pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan
		7. Masih rendahnya ketaatan dunia usaha dalam menerapkan dokumen lingkungan yang telah ditetapkan
		8. Masih sangat rendahnya upaya pengelolaan persampahan
		9. Belum memadainya regulasi yang berisi insentif dan insentif bagi pemangku kepentingan dalam menjaga kelestarian lingkungan
		10. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian Lingkungan Hidup

1	2	3	4	5	6	7	8	9
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFENISI OPERASIONAL	FORMULA PENGUKURAN	UNIT TERKAIT	SUMBER DATA	SUMBER DANA
1.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar perumahan	Cakupan permukiman layak	Persen (%)	Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara swakelola	Jumlah rumah tidak huniX 100% Jumlah seluruh rumah	Dinas Perumahan Kawasana Permukiman dan Lingkungan Hidup	Bidang Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	APBN/APBD
2.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar perumahan	Cakupan akses air minum	Persen (%)	Penyediaan prasarana dalam SPAM dengan jaringan perpipaan untuk menyediakan air minum yang memenuhi syarat kesehatan	Jumlah rumah tangga berakses air minumX 100% Jumlah seluruh rumah tangga	Dinas Perumahan Kawasana Permukiman dan Lingkungan Hidup	Bidang Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	APBN/APBD
3.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar perumahan	Cakupan sanitasi layak	Persen (%)	Pelaksanaan pembangunan sanitasi layak berupa pembangunan septictank individu dilaksanakan secara swakelola	Jumlah rumah tangga berakses sanitasiX 100% Jumlah seluruh rumah tangga	Dinas Perumahan Kawasana Permukiman dan Lingkungan Hidup	Bidang Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	APBN/APBD
4.	Terjaganya kualitas lingkungan sesuai standar baku mutu lingkungan	Indeks kualitas air		Pengukuran kualitas air melalui pengujian laboratorium	$\text{nilai relatif} = \frac{Ci}{LIj}$ Rumus Metode IP : $IP = \sqrt{\frac{(\frac{Ci}{LIj})^2 \text{rata-rata} + (\frac{Ci}{LIj})^2 \text{Maksimum}}{2}}$ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> $0 \leq PIj \leq 1,0 \rightarrow$ <i>baik (memenuhi baku mutu)</i> $1,0 \leq PIj \leq 5,0 \rightarrow$ <i>cemar ringan</i> $PIj \leq 10,0 \rightarrow$ <i>cemar sedang</i> $5,0 \leq PIj > 10,0 \rightarrow$ <i>cemar berat</i> </div>	Dinas Perumahan Kawasana Permukiman dan Lingkungan Hidup	Bidang Analisis dan Informasi Lingkungan	APBD
5.	Meningkatnya kebersihan kota	Meningkatnya pengelolaan sampah	Persen (%)	Sampah yang terangkut dari TPS (Tempat Pembuangan Sementara) ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir)	Volume timbulan sampah yang ditanganiX 100% Total timbulan sampah	Dinas Perumahan Kawasana Permukiman dan Lingkungan Hidup	Bidang Pengawasan Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan	APBD

Baa, 10 Februari 2020
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Lingkungan Hidup Kab. Rote Ndao

LEKSY N. FOEH, ST
Pembina Tk. I
NIP. 19711118 200003 1 003